

**ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA BAGIAN
SELATAN TAHUN 2015-2017**

SKRIPSI



Nama : Veny Pratiwi Miluwati

NIM : 222016088

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020**

**ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA BAGIAN
SELATAN TAHUN 2015-2017**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**Nama : Veny Pratiwi Miluwati
NIM : 222016088**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Veny Pratiwi Miluwati
NIM : 222016088
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Bagian Selatan Tahun 2015-2017

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata Satu baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Februari 2020


Veny Pratiwi Miluwati

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-
Sumatera Bagian Selatan Tahun 2015-2017
Nama : Veny Pratiwi Miluwati
NIM : 222016088
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, Februari 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,

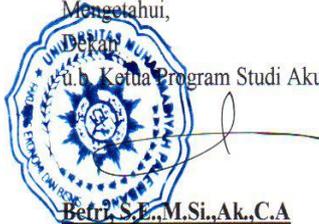


Dr. Sunardi, S.E., M.Si
NIDN/NBM: 0206046303/784021



Dr. Fadhil Yamali, S.E., Ak., M.M
NIDN/NBM : 0217107002/1191648

Mengotahui,
Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Ketua Program Studi Akuntansi



Beti, S.E., M.Si, Ak., C.A
NIDN/NBM: 0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

- ❖ *“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”*
(QS. Al-Baqarah: 153)
- ❖ *“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri.”* (QS. Al-Isra': 7)
- ❖ *“Berkaryalah dengan ikhlas, kesuksesan akan datang setelah melewati kegagalan dan perjuangan.”* (Penulis)

Ku persembahkan skripsi ini kepada:

- *Kedua Orang Tuaku Tercinta*
(Ayahandaku Agus Sutiyono &
Ibundaku Erma Susri)
- *Kedua Adikku Tersayang*
(M. Firdan Gifari & M. Abid Aqilla)
- *Dosen Pembimbingku*
- *Almamater yang kebanggakan*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alaamiin, ucap syukur atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia_Nyalah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Bagian Selatan Tahun 2015-2017”, dengan baik dan tepat pada waktunya sebagai upaya melengkapi syarat untuk mencapai jenjang Sarjana Strata Satu pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu bab pendahuluan, bab kajian kepustakaan, bab metode penelitian, bab hasil penelitian dan pembahasan serta bab kesimpulan dan saran. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, hal ini mengingat keterbatasan yang dimiliki penulis, baik dari segi ilmu ataupun pengalaman. Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dorongan, motivasi serta do'a dari berbagai pihak.

Dengan penuh rasa hormat, cinta, kasih sayang dan kerendahan hati. Penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua, Ayahanda Agus Sutiyono, S.E dan Ibunda Erma Susri yang sangat berjasa dalam mendidik, mendo'akan dan memberikan dorongan semangat kepada penulis selama ini sehingga memiliki makna besar dalam proses ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada

Bapak Drs. Sunardi, S.E.,M.Si dan Bapak Dr. Fadhil Yamali, S.E.,Ak.,M.M selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, memberikan pengarahan dan saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E.,M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri, S.E.,M.Si.,Ak.,CA dan Ibu Nina Sabrina, S.E.,M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Rahmad Basuki, S.E.,Ak.,M.Si selaku pembimbing akademik penulis yang telah membimbing dari semester satu sampai dengan sekarang.
5. Bapak Drs. Sunardi, S.E.,M.Si dan Bapak Fadhil Yamali, S.E.,Ak.,M.M selaku pembimbing skripsi.
6. Seluruh pimpinan, Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Segenap Pimpinan dan Pengurus di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan izin penelitian sehingga selesainya penyusunan skripsi ini.
8. Kakanda Terkasih Yogi Okpriansyah, S.E salah satu orang yang telah memberi makna besar bagi penulis, membagikan pengalaman, memberikan do'a, saran, serta motivasi dalam hal kebaikan di dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Kedua Adikku Tersayang (Firdan & Abid) beserta kedua Keluarga Besarku, Keluarga Besar Ali Usman dan Keluarga Besar H. Jakob yang selama ini selalu memberikan semangat dan do'a tulus yang tak hentinya untuk penulis.
10. Saudara tak sekandung (Rizka dan Dina) yang juga telah memberikan dukungan dan doa selama ini kepada penulis.
11. Sahabat-sahabat terbaikku (Melta, Pebby, dan Risma) yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan yang terpenting perjuangan kita takkan penulis lupakan.
12. Rekan-rekan seperjuangan Angkatan 2016 Program Studi Akuntansi terutama Paket 13 dan rekan-rekan satu pembimbingan, terima kasih atas kebersamaan dan motivasinya selama ini.
13. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian. Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang seikhlas-ikhlasnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, meskipun banyak usaha telah penulis lakukan tetapi skripsi ini masih jauh dari sempurna. Meskipun demikian mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat. Aamiin

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, Februari 2020

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PRAKATA.....	vi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II. KAJIAN PUSTAKA.....	13
A. Landasan Teori.....	13
1. Konsep Efektivitas.....	13
a. Pengertian Efektivitas.....	13
2. Laporan Keuangan Pemerintah.....	13
a. Pengertian Laporan Keuangan.....	13
b. Tujuan Laporan Keuangan.....	15
c. Manfaat Laporan Keuangan.....	16
d. Komponen Laporan Keuangan.....	17
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	18
4. Kinerja Keuangan Daerah.....	19
a. Pengertian Pengukuran Kinerja.....	19
b. Tujuan Penilaian Kinerja.....	20
c. Manfaat Pengukuran Kinerja.....	20

d. Elemen Pokok Pengukuran Kinerja.....	21
5. Analisis Kinerja Keuangan Daerah.....	22
a. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah.....	23
b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	24
B. Penelitian Sebelumnya.....	26
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Operasionalisasi Variabel.....	32
D. Populasi dan Sampel.....	38
E. Data yang Diperlukan.....	32
F. Metode Pengumpulan Data.....	33
G. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	35
1. Analisis Data.....	35
2. Teknik Analisis.....	36
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Hasil Penelitian.....	37
1. Data Umum.....	37
a. Gambaran Umum Provinsi Jambi.....	37
b. Gambaran Umum Provinsi Sumatera Selatan.....	39
c. Gambaran Umum Provinsi Bengkulu.....	41
d. Gambaran Umum Provinsi Lampung.....	43
e. Gambaran Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	44
2. Data Khusus.....	46
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	49
1. Rasio Efektivitas PAD.....	49
2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	57
3. Kabupaten/Kota yang memiliki Kinerja Paling Baik.....	64
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN.....	69
A. Simpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....
LAMPIRAN.....

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Anggaran Pendapatan Asli Daerah, Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Target dan Pendapatan Transfer Tahun 2015-2017.....	8
Tabel II.1 Kriteria Efektivitas PAD.....	24
Tabel II.2 Kriteria Kemandirian Daerah.....	25
Tabel II.3 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya.....	29
Tabel III.1 Operasional Variabel.....	32
Tabel IV.1 Anggaran PAD, Realisasi PAD, dan Pendapatan Transfer.....	46
Tabel IV.2 Rasio Efektivitas PAD Kabupaten/Kota Se-Sumatera Bagian Selatan.....	50
Tabel IV.3 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Bagian Selatan.....	58
Tabel IV.4 Perbandingan Kinerja Keuangan Kab/Kota Se-Sumatera Bagian Selatan.....	64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Jadwal Penelitian
Lampiran 2	Surat Riset Penelitian
Lampiran 3	Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
Lampiran 4	Lembar Persetujuan Skripsi
Lampiran 5	Sertifikat Hafalan Surat-surat Pendek Al-Qur'an
Lampiran 6	Sertifikat TOEFL
Lampiran 7	Sertifikat BUMDES
Lampiran 8	Sertifikat PKL
Lampiran 9	Surat Keterangan Bebas Plagiat
Lampiran 10	Surat Keterangan Terjemahan Abstrak
Lampiran 11	Biodata Penulis

ABSTRAK

Veny Pratiwi Miluwati/222016088/2020/Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Bagian Selatan Tahun 2015-2017/Akuntansi Sektor Publik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan Kabupaten/Kota Se-Sumatera Bagian Selatan jika dilihat dari rata-rata Rasio Efektivitas PAD dan rata-rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah selama 3 tahun dan untuk mengetahui Kabupaten/Kota yang memiliki kinerja keuangan paling baik selama 3 tahun. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian komparatif. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis dokumen. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan rumus Rasio Efektivitas PAD dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Bagian Selatan jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD dikategorikan cukup efektif karena rata-rata efektivitasnya sebesar 92,33%, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong rendah sekali dalam kategori pola hubungan instruktif karena rata-rata rasionya sebesar 10,00%, dan kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Bagian Selatan selama 3 tahun yang paling baik yaitu terdapat di Kabupaten Merangin.

Kata Kunci : Kinerja Keuangan, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

ABSTRACT

Veny Pratiwi Miluwati/ 222016088/2020/Analysis of Financial Performance Comparison of Local Government of Districts/Cities of South Sumatera in 2015-2017/Public Sector Accounting.

This study aimed to determining the comparison of financial performance of Districts/Cities of Southern Sumatera ifviewed from the average PAD Effectiveness Ratio and the Average Regional Financial Independence Ratio for 3 years and to find out the Districts/Cities which have been the best financial performance for 3 years. This study used a type of comparative study. This study was conducted in the Financial Audit Board of the Republic of Indonesia. The data used in this study was secondary data. The data collection technique used in this study was document analysis methods. The data analysis methods used were quantitative analysis and qualitative analysis. The data analysis technique used in this study were the formula for the PAD Effectiveness Ratio and Regional Financial Independence Ratio. The results of thisstudy found that the financial performance of the Districts/Cities in southern Sumatera, if could be seen from the PAD effectiveness Ratio was categorized quite effectively because the average effectiveness was 92.33%, Regional Financial Independence ratio was still relatively low in the category of patterns of instructive relationships because of the average ratio was 10.00%. The best financial performance in South Sumatera from 2015-2017 or 3 years was Merangin District.

Keywords: Regional Financial Performance, PAD Effectiveness Ratio, Regional Financial Independence Ratio.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Daerah merupakan suatu Organisasi yang memiliki tugas untuk mengatur roda pemerintahan di daerah, membiayai semua kegiatan yang dilakukan, dan melakukan berbagai upaya untuk memperoleh serta meningkatkan penerimaan Daerah dengan cara mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Daerah dapat dikatakan maju dan berkembang apabila mampu menciptakan suatu roda Pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan penerapan *value for money* yang benar. Sebagai organisasi nonprofit atau organisasi yang tidak berorientasi pada keuntungan, maka pemerintah daerah memiliki tujuan utama yaitu memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal peningkatan dalam segi Pendidikan, Kesehatan, Keamanan, Infrastruktur dan lain-lain.

Era baru dalam pelaksanaan Otonomi Daerah menimbulkan unsur tuntutan pelaksanaan Otonomi Daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggungjawab kepada Pemerintah terutama pada tingkat Kabupaten/Kota. Untuk mewujudkan hal itu maka Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang ini memberikan wewenang secara luas bagi Daerah dalam memobilisasi sumber dana,

menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran agar dapat dikelola secara efisien dan efektif. Harapannya dengan adanya Otonomi Daerah ini Pemerintah Daerah dapat lebih mandiri dan dapat melakukan pengelolaan keuangannya secara efektif dalam rangka mewujudkan peningkatan kinerja dan daya saing Pemerintah Daerah.

Kemampuan suatu Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mengelola keuangan dan mengatur rumah tangganya sendiri dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang mencerminkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan, pemerataan, serta keadilan dengan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing Daerah. Dalam pengelolaan APBD perlu ditetapkan dan diterapkan standar sebagai acuan untuk melihat kapan suatu daerah dapat dikatakan mandiri, efektif dan akuntabel. Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Keuangan Daerah yaitu dengan diwajibkannya Pemerintah Daerah menyusun laporan pertanggungjawaban.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mewajibkan Presiden dan Gubernur/Bupati/Walikota untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD yaitu berupa Laporan Keuangan. Laporan Keuangan itu sendiri setidaknya meliputi: Laporan Realisasi APBN/APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam pengelolaan keuangan maka laporan keuangan pemerintah harus memenuhi prinsip tepat waktu dan dapat

diandalkan (*reliable*) serta disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Keuangan (SAP) yang telah diterima secara umum (Ramli, 2016: 3).

Menurut Tampubolon (2005: 45) dalam Jaenuri (2016) mengemukakan Kinerja Keuangan adalah “Pengukuran kinerja instansi yang ditimbulkan sebagai akibat dari proses pengambilan keputusan manajemen karena menyangkut pemanfaatan modal, efisiensi dan rentabilitas dari kegiatan instansi”. Kinerja keuangan akan menunjukkan penilaian hasil kinerja yang telah dicapai dalam suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya yang dapat dibandingkan bagaimana kecenderungannya.

Pengukuran Kinerja secara umum adalah pengukuran terhadap kinerja yang dilakukan untuk mengetahui apakah selama pelaksanaan kinerja terdapat penyimpangan atau deviasi dari rencana yang telah ditentukan, atau apakah kinerja dapat dilakukan sesuai jadwal waktu yang ditentukan, atau apakah hasil kinerja telah tercapai sesuai dengan yang diharapkan (Hery, 2019: 73). Artinya pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangannya pada masa yang akan datang.

Kepentingan urusan publik menjadikan indikator pengukuran kinerja sebagai alat evaluasi terhadap kinerja dan kemampuan daerah agar Pemerintah terpacu untuk meningkatkan kinerjanya ditahun berikutnya dan memulihkan kinerja dengan pembanding skema kerja dan pelaksanaannya, serta pengukuran kinerja juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan yaitu kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik telah

dikelola secara ekonomis, efektif, dan efisien. Dalam menganalisis kinerja Pemerintah Daerah salah satu alat yang dapat digunakan adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dijalankan.

Menurut Ramli (2016: 5) Ada beberapa cara untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerah salah satunya adalah dengan menggunakan Rasio Keuangan Daerah. Beberapa rasio yang bisa digunakan adalah: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio DSCR (*Debt Service Coverage Ratio*).

Rasio Efektivitas PAD akan menunjukkan kemampuan Daerah dalam menjalankan tugasnya. Semakin tinggi rasio efektivitas yang dicapai maka kemampuan daerah dapat dikategorikan efektif, dan demikian pula sebaliknya. Efektivitas menunjukkan kemampuan Pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri adalah semua Penerimaan Daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli suatu daerah masing-masing. Komponen Pendapatan Asli Daerah ada empat yaitu: Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah.

Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai seluruh kegiatan pemerintahan, dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain, baik dari bantuan pemerintah pusat dan provinsi

maupun pinjaman ekstern. Rasio Kemandirian akan menunjukkan semakin tinggi rasio kemandirian yang dicapai maka tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak lain akan semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Taufik (2017) dengan judul Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kota Se-Sumatera. Penelitian ini menggunakan empat indikator yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio aktivitas pada kabupaten/kota se-Sumatera tahun 2007-2011. Dengan teknik analisis data menggunakan analisis Uji Beda (*Independent Sampel t Test*). Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah periode opini WTP_WDP dan kinerja keuangan pemerintah daerah periode opini TW_TMP pada kabupaten/kota Se-Sumatera tahun 2007-2011. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah periode opini WTP_WDP tidak lebih dan tidak berbeda dengan kinerja keuangan pemerintah daerah periode opini TW_TMP. Serta kinerja keuangan Induk tidak lebih dan tidak berbeda dengan kinerja keuangan pemerintah daerah Anak/Pemekaran.

Penelitian yang sama dilakukan oleh Jaenuri (2016) dengan judul Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Bojonegoro dan Jombang Tahun 2010-2014. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan analisis rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi, rasio aktivitas keserasian dan rasio

pertumbuhan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Bojonegoro lebih unggul apabila dibandingkan kabupaten Jombang. Hal tersebut dapat dilihat dari: Rata-rata Rasio Kemandirian, Rata-rata Rasio Efektifitas PAD dan Efisiensi, Rata-rata Rasio Aktifitas Keresasian Belanja Operasi dan Belanja Modal, dan Rata-rata Rasio Pertumbuhan.

Penelitian hal yang serupa juga dilakukan oleh Jatnika Dwi Asri (2016) dengan judul Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2013. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kinerja keuangan serta menganalisis apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan antara kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama 2009-2013. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik analisis data kuantitatif rasio keuangan yang terdiri dari rasio kemandirian dan rasio efektifitas PAD serta uji T dan uji Mann-Whitney. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah kota mempunyai tingkat rasio kemandirian lebih tinggi dibandingkan kabupaten. Rasio efektivitas kabupaten/kota sangat efektif dengan rata-rata 120.06%. Hasil uji T dan Mann-Whitney menunjukkan tidak terdapat perbedaan antara rasio efektivitas, sedangkan rasio kemandirian menunjukkan perbedaan.

Penelitian ini akan mengambil objek yang berbeda yaitu 60 Kabupaten/Kota Se-Sumatera Bagian Selatan yang terdiri dari 5 Provinsi yaitu Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung selama 3 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2015, 2016, dan 2017.

Berikut dapat di lihat Data Total Seluruh Anggaran Pendapatan Asli Daerah, Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer dari 60 Kabupaten/Kota per Provinsi Se-Sumatera Bagian Selatan tahun 2015-2017.

Tabel I.1
Anggaran Pendapatan Asli Daerah, Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer
Tahun 2015-2017

Provinsi	Jmlh Kab/ Kota	Total Dari Seluruh Kabupaten/Kota Per-Provinsi Se-Sumatera Bagian Selatan													
		Total Anggaran PAD (RP)			Total Realisasi PAD (Rp)			Perbandingan Realisasi terhadap Anggaran (%)			Total Pendapatan Transfer (RP)			Trend (%)	
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015/ 2016	2016/ 2017
Jambi	11	985.815	1.057.023	2.528.778	939.374	1.012.365	2.530.071	95,29	95,78	100,05	9.868.194	11.337.681	11.518.014	14,89	1,59
Sumatera Selatan	17	2.344.942	2.652.656	3.897.720	2.105.768	2.192.698	3.111.595	89,80	82,66	79,83	19.049.777	20.693.995	22.239.809	8,63	7,47
Bengkulu	10	496.468	498.248	690.130	418.174	509.579	659.698	84,23	102,27	95,59	7.275.723	8.181.137	7.842.471	12,44	-4,14
Lampung	15	1.612.115	1.599.901	2.616.316	1.276.655	1.252.266	1.680.518	79,19	78,27	64,23	15.585.306	16.125.781	16.655.001	3,47	3,28
Kepulauan Bangka Belitung	7	623.438	579.444	892.572	624.497	592.824	933.441	100,17	102,31	104,58	4.958.435	4.521.139	4.984.802	-8,82	10,26

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2019

Tabel I.1 menunjukkan Data Total Seluruh Anggaran Pendapatan Asli Daerah, Total Seluruh Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Total Seluruh Pendapatan Transfer dari 60 Kabupaten/Kota Per Provinsi Se-Sumatera Bagian Selatan yang terdiri dari 5 Provinsi yaitu Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung selama 3 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2015, 2016, dan 2017. Fenomena yang terjadi selama 3 tahun menunjukkan bahwa realisasi PAD Kabupaten/Kota dari kelima Provinsi mengalami kenaikan dan penurunan atau fluktuatif. Meskipun demikian realisasi PAD sebagian besar Kabupaten/Kota sudah dapat dikatakan cukup baik, namun jika ditinjau dari realisasi PAD terhadap anggaran PAD dapat dikatakan bahwa sebagian besar Kabupaten/Kota belum mampu merealisasikan sesuai target anggaran ataupun melebihi dari target anggaran yang telah ditetapkan setiap tahunnya, serta selama 3 tahun berturut-turut pendapatan transfer sebagian besar Kabupaten/Kota mengalami trend kenaikan setiap tahunnya, hal ini terjadi akibat dari minimnya PAD dibandingkan dengan bantuan dari pihak ektern.

Beberapa permasalahan keuangan yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Se-Sumatera Bagian Selatan antara lain: 1) relatif kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan total penerimaan daerah yang mencerminkan rendahnya kemampuan pemerintah daerah (Pemda) dalam menggali potensi sumber-sumber asli daerah, 2) kurangnya kemampuan dan usaha pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan yang ada, 3) tingginya ketergantungan pemerintah daerah kepada bantuan pihak ekstern terutama pemerintah pusat

dan provinsi serta pinjaman yang tercermin dalam besarnya total penerimaan pendapatan transfer.

Di Indonesia kebanyakan kota-kota kecil masih belum mandiri dalam hal pengelolaan kinerjanya, seharusnya dengan dilaksanakannya Otonomi Daerah Pemerintah Daerah terutama Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Bagian Selatan harus lebih berani dalam memaksimalkan berbagai potensi yang dimilikinya sehingga realisasi PAD semakin besar, serta dengan besarnya PAD memberi peluang bagi Pemerintah Daerah tersebut untuk memiliki tingkat kemandirian yang tinggi, sehingga berbagai permasalahan yang telah dijelaskan diatas dapat mulai teratasi.

Perekonomian setiap daerah tentu memiliki suatu perbedaan, hal itu bisa terjadi baik dari sisi Jumlah Penduduk, Sumber Pendapatan Asli Daerah, Letak Geografis suatu Daerah, Kemampuan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan potensi yang ada, serta Lembaga yang memiliki peran sebagai Pengawas Keuangan Daerah, sehingga memberikan ciri khas tersendiri dari setiap daerah dan tentu saja hal itu membuat perbedaan pula pada kinerja keuangannya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Bagian Selatan Tahun 2015-2017”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Perbandingan Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Se-Sumatera Bagian Selatan jika dilihat dari Rata-rata Rasio Efektivitas PAD dan Rata-rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah selama 3 tahun?
2. Kabupaten/Kota manakah yang memiliki Kinerja Keuangan paling baik selama 3 tahun?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Perbandingan Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Se-Sumatera Bagian Selatan jika dilihat dari Rata-rata Rasio Efektivitas PAD dan Rata-rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah selama 3 tahun.
2. Kabupaten/Kota yang memiliki Kinerja Keuangan paling baik selama 3 tahun.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi Penulis
Penelitian ini merupakan media untuk belajar memecahkan masalah secara ilmiah dan untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran, masukan dan referensi pemikiran bagi Pemerintah Daerah Se-Sumatera Bagian Selatan didalam menganalisis kinerja keuangan guna meningkatkan EfektifitasPendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan Kemandirian Daerah pada perkembangan zaman yang semakin kompetitif.

3. Bagi Almamater

Bagi mereka yang ingin meneliti diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan tambahan pengetahuan dan sebagai bahan acuan atau referensi dan literatur pelengkap untuk kajian lebih lanjut di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisman. 2014. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Keuangan di Aceh Barat. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*. Vol 1(02): 48-54.
- Asri, Jatnika Dwi. 2016. Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2013. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. Vol 4 (02): 1021-1034.
- Delima, Nadia Ayu. dkk. 2016. Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Di Sumatera Bagian Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol 14 (02): 69-78.
- Fathah, Rigel Nurul. 2017. Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal Universitas Aisyiyah Yogyakarta*. Yogyakarta. Vol 8(01): 33-48.
- Faud, M. Ramli. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Cetakan Pertama. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hery. 2019. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT Grasindo.
- H.Mutiha, Arthaingan. 2016. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010-2014. *Jurnal Vokasi Indonesia*. Vol 4 (02): 105-121.
- <https://www.bpk.go.id>
- <https://www.bps.go.id>
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: Andi
- Jaenuri. 2016. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Bojonegoro dan Jombang Tahun 2010-2014. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol 14 (01): 34-45.

- Mahmudi. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Keempat. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nourdiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurlina, dkk. 2017. *Metodelogi Penelitian Ekonomi & Sosial*. Jakarta: Salemba Empat
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 tahun 2010. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Renyowijoyo, Muindro. 2013. *Akuntansi Sektor Publik, Organisasi Non Laba*. Edisi Ketiga. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sujarweni. V. Wiratna. 2018. *Metodelogi Penelitian Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Taufik. 2017. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kota Se-Sumatera. *Jurnal Ilmiah Gema Ekonomi*. Vol 7 (01): 993-1012.
- Undang-Undang No. 17 tahun 2003. *Tentang Keuangan Negara*.
- Undang-Undang No. 33 tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang No. 23 tahun 2014. *Tentang Pemerintah Daerah*.